



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP) Tahun Anggaran 2023

**BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Wijaya 1 No. 5 A, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan

DAFTAR ISI

PENGANTAR

BAB I PENDAHULUAN..... 2

 Gambaran umum.....2

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 6

 A. Visi dan Misi..... 6

 B. Tujuan dan Sasaran 6

 C. Perjanjian Kinerja... 7

BAB III Akuntabilitas Kinerja..... 9

 A. Capaian Kinerja9

 B. Realisasi Anggaran.....12

BAB IV PENUTUP.....14

 A. Kesimpulan.....14

 B. Permasalahan dan Kendala.....14

 C. Saran.....15

PENGANTAR

Untuk meujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang kredibel dan dapat dipercaya oleh masyarakat, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi dimana salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh setiap OPD adalah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023. LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu (1) Tahun Anggaran. Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan di Jabarkan dalam bentuk LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan secara garis besar berbagai kegiatan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 ini juga disusun dalam upaya evaluasi pelaksanaan tugas selama Tahun 2023.

Penyusunan LkjiP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu tolak ukur dari Kinerja Instansi Pemerintah, Khususnya Badan Penghubung dan kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2023 Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhana wa ta 'ala senantiasa melindungi kita semua.

 **KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROV. SUMATERA SELATAN
DI JAKARTA**

M.A. DEDY RAHMADI, S.E.

PENATA TK. I / III.d

NIP. 197207252006041009

GAMBARAN UMUM

Penyampaian LKjIP merupakan salah satu kewajiban konstitusional yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 27 ayat 2 bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintahan dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Penyampaian laporan LKjIP tersebut selain dimaksudkan sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan, juga sebagai upaya Pemerintah Daerah melaksanakan prinsip “good governance” yang meliputi Transparansi, Akuntabilitas, Partisipatif, melakukan Efisiensi dan Efektifitas serta meningkatkan fungsi pengawasan lembaga legislatif terhadap jalannya pemerintahan.

LKjIP yang menjadikan informasi objektif tentang capaian Kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan bermanfaat untuk :

- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah & pembangunan secara baik & benar (good governance).
 - Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif & responsif terhadap aspirasi Masyarakat & lingkungannya.
 - Memberi masukan & umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan & peningkatan kinerja instansi Pemerintah.
 - Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
 - Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :
- **Aspek Akuntabilitas kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2023. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2023.
 - **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang sehingga dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta yang berkedudukan di Jakarta dibentuk di era tahun 1968 dengan sebutan Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 tahun 2001, tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan pada tanggal 1 Mei 2001 dilakukan perubahan sebutan nama menjadi Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Seiring perjalanan waktu dimana volume dan beban kerja yang semakin bertambah maka pada tanggal 27 Desember 2016 ditetapkan sebagai Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta dimana kedudukannya adalah

sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan tugas utamanya antara lain memberikan pelayanan yang optimal terhadap tugas-tugas Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen serta unsur masyarakat swasta.

KEPALA BADAN PENGHUBUNG

Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai tugas memfasilitasi dan membantu Gubernur dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan Provinsi, memberikan pelayanan informasi, pelayanan aparatur pemerintah provinsi, fasilitasi promosi dan hubungan antar lembaga serta pembinaan masyarakat dan mahasiswa provinsi di Jakarta.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perwakilan Pemerintah Provinsi di Jakarta;
- b. Penyelenggaraan administrasi umum Badan Perwakilan;
- c. Penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintahan/ non pemerintah dan antar pemerintah daerah di tingkat nasional dan internasional;
- d. Pemberian pelayanan terhadap Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta;
- e. Penyelenggaraan fasilitasi promosi daerah, pembinaan masyarakat dan mahasiswa Provinsi di Jakarta;
- f. Pengelolaan Anjungan Sumatera Selatan di Taman Mini Indonesia Indah sebagai sarana promosi daerah; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta terdiri dari sub bagian dan sub bidang sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, ketatausahaan dan kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan dilingkungan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta.

Rincian tugas Sub Bagian tata usaha adalah sebagai berikut :

1. Merencanakan kegiatan dan program kerja serta pengumpulan dan analisis data
2. Memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Badan Penghubung
3. Merencanakan anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan
4. Melaksanakan penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik Negara/ Daerah
5. Melaksanakan urusan rumah tangga
6. Melaksanakan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan
7. Melakukan evaluasi, monitoring dan pelaporan program kerja
8. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)
9. Melaksanakan urusan pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin pegawai
10. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan tata usaha
11. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta bidang hubungan antar lembaga berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur Sumatera Selatan. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang Hubungan Antar Lembaga
2. Melakukan fasilitasi di bidang kerjasama antar Pemerintah Provinsi dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam perjanjian kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah dan antar pemerintah daerah
4. Melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait dalam penyediaan maupun penerimaan data dan informasi dalam hubungan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
5. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
7. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

3. Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan

Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan, Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melakanakan tugas tersebut Sub Bidang Promosi dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan kemasyarakatan
2. Memfasilitasi kegiatan promosi terkait potensi daerah diluar Provinsi
3. Melaksanakan pembinaan masyarakat dan mahasiswa Sumatera Selatan di Jakarta
4. Mengelola Anjungan Provinsi di Taman Mini Indonesia Indah
5. Meyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi dengan perangkat daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota terkait promosi dan potensi daerah di Jakarta
6. Menyenggarakan fasilitasi kegiatan masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta dalam pelestarian seni budaya
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
8. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

4. Sub Bidang Protokol dan Pelayanan

Sub Bidang Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta Sub bidang Protokol dan Pelayanan Protokol berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur. Sub Bidang Pelayanan dan Protokol di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Protokol dan Pelayanan yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Protokoler dan Pelayanan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang protokoler dan pelayanan informasi
2. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan unsur Pimpinan DPRD Provinsi yang berdinasi di Jakarta
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi kegiatan protokoler dengan lembaga pemerintah/ non pemerintah dan antar pemerintah daerah
4. Menyiapkan data potensi dan pembangunan Provinsi
5. Melakukan pelayanan informasi data potensi pembangunan Provinsi
6. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan
7. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan, dan
8. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan

II. PERENCANAAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan visi, misi, usulan, sasaran, strategi dan kebijakan organisasi dengan mempertimbangkan kajian lingkungan internal dan eksternal.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian visi dan misi. Semua kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada rencana strategi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

• Visi

“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”

• Misi Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah:

1. Meningkatkan kerjasama dan hubungan antar Pemerintah Daerah dengan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Swasta.
2. Meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat daerah maupun masyarakat umum tentang kegiatan pembangunan dan lainnya di Sumatera Selatan.
3. Meningkatkan kegiatan Promosi Daerah tentang Ekonomi, Sosial Budaya dan Pariwisata melalui Taman Mini “Indonesia Indah”
4. Meningkatkan pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat Sumatera Selatan di Jakarta dan sekitarnya.
5. Meningkatkan pelayanan administratif kepada masyarakat.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang merupakan hasil akhir sesuatu yang ingin dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu – isu dan analisis strategi. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi, dimana tujuan yang akan dicapai oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan didasarkan rumusan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan aparatur yang memiliki Sumber Daya Masyarakat yang profesional
Misi ini ditujukan untuk peningkatan kinerja pelaksanaan tugas, fungsi dan sasaran yang dicapai sebagai berikut :
 - Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan aparatur ;
 - Meningkatkan kerja sama antar Lembaga / Departemen Pemerintah / Non Pemerintah.
- b. Mewujudkan layanan publik sesuai tuntutan dan kebutuhan aparatur Pemerintah Daerah dan Pusat serta Masyarakat
Misi ini untuk meningkatkan pelayanan publik dengan tuntutan kebutuhan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan, sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- Tersedianya sarana transportasi yang memadai bagi pejabat daerah yang bertugas/dinas ke Jakarta;
 - Mampu bertindak cepat dan tanggap terhadap permasalahan daerah yang akan diselesaikan di tingkat pusat;
 - Mampu bertindak dan memberikan kepercayaan terhadap pihak lain untuk datang berinvestasi di daerah.
- c. Mewujudkan promosi seni budaya, potensi sumber daya alam dan pariwisata sebagai show window daerah sebagai daya tarik investasi Daerah dan Nasional.
- Misi ini ditujukan untuk mendorong dan memajukan pembangunan promosi dengan sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
- Meningkatkan layanan dan untuk penyebaran informasi;
 - Meningkatnya dukungan penyelenggaraan produk unggulan daerah.
- d. Mewujudkan hubungan antar lembaga yang harmonis antara kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Misi ini ditujukan untuk meningkatkan jalinan kemitraan maka sasaran yang akan dicapai sebagai berikut :
- Optimalnya hubungan kerja dan kerjasama pembangunan antar lembaga Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat. Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pemerintah Daerah.

Sasaran adalah penjabaran pada penyusunan kegiatan, terinci dapat diukur dan dapat dicapai mengarah pada untuk sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan tujuan tersebut maka sasaran yang dicapai Badan Penghubung sebagai berikut :

1. Meningkatkan sumberdaya aparatur yang lebih professional;
2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap tugas Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di Jakarta;
3. Terjalin kerjasama yang dibangun antara Pemerintah Daerah dan Lembaga/Pemerintah serta Departemen/Non Departemen serta kerjasama Internasional;
4. Meningkatkan promosi kebudayaan Sumatera Selatan di Jakarta melalui pagelaran seni budaya dan pameran, baik di Anjungan TMII maupun event – event pameran di Jakarta;
5. Meningkatkan Pelayanan dan Protokoler;
6. Mempermudah penyelesaian berbagai kegiatan pejabat pemerintah daerah dan pekerjaan dinas.

C. PERJANJIAN KINERJA 2023

Setelah APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan menyusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023. Adapun Dokumen Perjanjian Kinerja dapat diuraikan pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatkan Kualitas Layanan dalam menunjang Tugas Pimpinan di Ibu Kota Jakarta	Indeks kepuasan terhadap layanan	100%

A. CAPAIAN KINERJA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SUMATERA SELATAN

Mendasarkan pada amanat Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja.

Laporan kinerja merupakan laporan yang memberikan gambaran progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Akuntabilitas kinerja merupakan suatu bentuk kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tentang keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran kinerja organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan secara transparan akuntabel. Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategic planning suatu organisasi.

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1	2	3
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75-100%	Baik
3	55-74%	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan TA 2023 telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Strategis (Renstra).

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dan Rencana Strategis Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan 2019 – 2023, Sasaran Strategis yang diwujudkan pada tahun ini, yaitu :

1. Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	% Capaian Tahun 2022	% Capaian Thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan kualitas pelaksanaan Tugas KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD yang bertugas di Ibukota Jakarta	Nilai Survey Kepuasan KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan DPRD	100%	98%	100%	100%	100%

Pelayanan KDH/WKDH yang bertugas di Jakarta Tahun 2023 terealisasi sebesar 98,49%. Hal ini berarti bahwa pelayanan KDH/WKDH dan unsur Pimpinan

yang bertugas di Jakarta berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Pembuatan Pas Bandara, Belanja Jasa Tenaga Kerja/Tenaga Lainnya (Vooridjer), Pelayanan Protokoler KDH / WKDH ,Setda serta Pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka mengkoordinasikan acara-acara kedinasan di Jakarta dan sekitarnya.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 407.500.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 401.362.889,- (98,49%) dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 6.137.111,-

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Pelayanan Penghubung.

2. Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatnya Persentase Pelayanan Kedinasan yang di fasilitasi sesuai dengan SOP	Persentase Pelayanan Kedinasan yang di fasilitasi sesuai dengan SOP	100%	98%	100%	100%	100%

Pelayanan kedinasan yang difasilitasi sesuai dengan SOP Tahun 2023 terealisasi sebesar 97,39%. Hal ini berarti bahwa kegiatan Belanja Rutin berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%.

Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Kegiatan:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Bahan Logistik Kantor, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas

atau Kendaraan Dinas Jabatan, Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini adalah Rp. 13.698.898.000,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp. 13.340.831.135,- (97,39%) dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 358.043.750,-

Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

3. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Layanan Informasi dan Ekspose Sumatera Selatan di Ibukota Jakarta	Jumlah kunjungan Wisatawan ke Anjungan Sumatera Selatan	100%	100%	100%	85%	100%
Memperkuat Silaturahmi Masyarakat dan Mahasiswa Sumatera Selatan di Ibukota	Nilai IKM	A	A	A	A	A

Pengelolaan Keragaman Budaya Tahun 2023 terealisasi sebesar 99,78%. Hal ini berarti bahwa Pengelolaan Keragaman Budaya berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%. Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Pekan Acara TMII yang diselenggarakan di Anjungan Sumatera Selatan TMII.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula adalah Rp 460.000.000,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp. 458.990.497,- (99,78%) dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 1.009.503,-. Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Layanan Penghubung.

4. Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian Tahun 2023	% Capaian Tahun 2021	% Capaian Thd Target Akhir Renstra (2023)
1	2	3	4	5	6	7
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah	Nilai Indeks Kepuasan OPD yang menjadi mitra kerja	A	A	A	A	A

Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar 99%. Hal ini berarti bahwa Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berjalan dengan baik dan sesuai dengan target pencapaian 100%. Kegiatan yang telah dilakukan di Jakarta meliputi Pelayanan Koordinasi.

Penggunaan anggaran keuangan dalam upaya mencapai sasaran ini semula adalah Rp 115.000.000,-. Dari total anggaran tersebut terealisasi Rp. 114.810.866,- (99,84%) dan terdapat Sisa Anggaran sebesar Rp. 189.134,-. Pencapaian sasaran ini tidak terlepas dari dilaksanakannya Program Layanan Penghubung.

B. REALISASI ANGGARAN

Capaian realisasi keuangan atas pengelolaan APBD TA 2023 pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan secara keseluruhan tercapai sebesar 97,51% . Adapun untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang tingkat pencapaian kinerja sesuai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023, berikut disajikan tabel Pencapaian Kiinerja Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

Uraian Program/Kegiatan	Target	Pagu	Realisasi
PENGELOLAAN PENGHUBUNG		Rp14.681.398.000	Realisasi Keuangan Sebesar Rp 14,315,995,387 atau 97,51% dengan sisa pagu anggaran Rp 355.379.498
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya tata kelola pemerintah yang baik (100%)	Rp13.698.898.000	Realisasi Keuangan Sebesar Rp 13,340,831,135 atau 97,39% dengan sisa pagu anggaran Rp 358.043.750
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp6.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp 6.000.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp 0
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 12 Laporan	Rp6.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 6.000.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp 0 dan Realiasi fisik sebesar 100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp5.230.100.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp 5,230,100,000 atau 95,53% dengan sisa pagu anggaran Rp 233.971.646
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 42 Orang	Rp4.998.100.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 4,778,818,354 atau 95,61% dengan sisa pagu anggaran Rp 219.281.646 dan Realiasi fisik sebesar 100%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 12 Dokumen	Rp232.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 217,310,000 atau 93,67% dengan sisa pagu anggaran Rp 14.690.000 dan Realiasi fisik sebesar 100%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp5.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp 5.000.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp 0
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 1 Dokumen	Rp5.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 5.000.000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp 0 dan Realiasi fisik sebesar 100%
Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp2.595.245.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp 2,594,903,061 atau 99,99% dengan sisa pagu anggaran Rp 341.939
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan 12 Paket	Rp200.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 199,999,000 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp 1.000 dan Realiasi fisik sebesar 100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 Paket	Rp695.245.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 694,977,634 atau 99,96% dengan sisa pagu anggaran Rp 367,366 dan Realiasi fisik sebesar 100%

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan 12 Paket	Rp200.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 199,980,000 atau 99,99% dengan sisa pagu anggaran Rp 20,000 dan Realisasi fisik sebesar 100%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan	Rp1.500.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 1,499,946,427 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp 53.573 dan Realisasi fisik sebesar 100%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp2.962.553.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp 2,948,003,355 atau 100% dengan sisa pagu anggaran Rp 14,549,645
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan	Rp50.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 49,992,000 atau 99,98% dengan sisa pagu anggaran Rp 8,000 dan Realisasi fisik sebesar 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan	Rp273.600.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 267,030,095 atau 97,60% dengan sisa pagu anggaran Rp 6,569,905 dan Realisasi fisik sebesar 100%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan	Rp2.638.953.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 2,630,981,260 atau 99,70% dengan sisa pagu anggaran Rp 7.971.740 dan Realisasi fisik sebesar 100%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp2.900.000.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp 2,790,796,365 atau 96,23% dengan sisa pagu anggaran Rp 109,108,520
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya sebanyak 33 unit kendaraan dinas roda 4 dan 13 unit roda 2	Rp2.600.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 2,490,819,480 atau 95,80% dengan sisa pagu anggaran Rp 109,180,520 dan Realisasi fisik sebesar 100%
PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG		Rp982.500.000	Realisasi Keuangan Program Kegiatan Sebesar Rp 975,164,252 atau 99,25 dengan sisa pagu anggaran Rp 7,335,748
Pelaksanaan Pelayanan Penghubung		Rp982.500.000	Realisasi Keuangan Kegiatan Sebesar Rp 975,164,252 atau 99,25 dengan sisa pagu anggaran Rp 7,335,748
Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah 12 Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Rp115.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 114,810,866 atau 99,84% dengan sisa pagu anggaran Rp 189,134 dan Realisasi fisik sebesar 100%
Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah 12 Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Rp460.000.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 458,990,497 atau 99,78% dengan sisa pagu anggaran Rp 1,009,503 dan Realisasi fisik sebesar 100%
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah 12 Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Rp407.500.000	Realisasi Keuangan Subkegiatan Sebesar Rp 401,362,889 atau 98,49% dengan sisa pagu anggaran Rp 35.032.129 dan Realisasi fisik sebesar 100%
TOTAL ANGGARAN		Rp14.681.398.000	Realisasi Keuangan Sebesar Rp 14,315,995,387 atau 97,51% dengan sisa pagu anggaran Rp 365,379,489

Realisasi belanja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2023 sebesar Rp 14.315.995.387 (97,51%).

A. KESIMPULAN

Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan adalah OPD yang mempunyai Tugas membantu / melayani KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM dan sumber dana serta sarana dan prasarana yang efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data di atas, maka kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan selama Tahun 2023 yang dilakukan dengan beberapa Program dan Kegiatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya Pelayanan Publik bagi KDH/WKDH dan Unsur Pimpinan Daerah Sumatera Selatan”.

Rata-rata pencapaian Sasaran Strategis adalah sebesar 100% atau Kategori Baik. Tercapainya nilai tersebut memperlihatkan bahwa Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan mampu melaksanakan Program dan Kegiatan dengan berpedoman kepada rencana Strategis 2018-2023, Dokumen Penggunaan Anggaran Tahun 2023 serta memperhatikan Indikator Kinerja Utama.

Alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 adalah sebagai Berikut :

1. Belanja Operasi sebesar Rp. 14.681.398.000,- dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 14.315.995.387,-.
2. Belanja Modal sebesar Rp. 0 dengan realisasi Anggaran sebesar Rp. 0.

Dengan terciptanya sasaran tersebut diharapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan organisasi dan semangat kerja yang lebih baik lagi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 pada dasarnya menyajikan informasi pengukuran Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mendorong terwujudnya *Good Governance* di Sumatera Selatan dan kepercayaan Masyarakat akan keberadaan dan tanggung jawab yang baik dari Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Permasalahan dan kendala yang ini temukan dalam pencapaian target kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 antara lain :

1. Masih belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas Sumber Daya Manusia yang handal dan Profesional baik segi kualitas maupun kuantitas;
2. Masih kurangnya apresiasi masyarakat terutama generasi muda untuk mempromosikan budaya Sumatera Selatan agar dikenal oleh masyarakat luas;
3. Masih belum lengkapnya fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai guna meningkatkan promosi seni dan budaya daerah di Anjungan Sumatera Selatan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta;

C. SARAN

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan di masa mendatang antara lain :

1. Penambahan SDM yang kompeten pada Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan serta mengoptimalkan Kompetensi dan Kapabilitas SDM yang sudah tersedia melalui mengikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan maupun pihak lain agar terbentuk Sumber Daya Manusia yang handal dan profesional baik dari segi kualitas maupun kuantitas.
2. Meningkatkan promosi mengenai kesenian dan budaya Sumatera Selatan kepada seluruh lapisan masyarakat yang ada di Jakarta terutama generasi muda, karena dengan melakukan promosi kesenian budaya Sumatera Selatan dengan sasaran generasi muda dikarenakan dapat mengoptimalkan promosi dengan pengguna media sosial dan teknologi yang terbaru.
3. Melakukan perbaikan-perbaikan, perawatan dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana Anjungan Sumatera Selatan TMII guna kenyamanan dan peningkatan jumlah pengunjung yang hadir disetiap pertunjukan yang digelar di Anjungan Sumatera Selatan TMII.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Badan Penghubung Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 disusun, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan dapat.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROV. SUMATERA SELATAN
DI JAKARTA**



M.A. DEDY RAHMADI, S.E.
PENATA TK. I / III.d
NIP. 197207252006041009